

# Menggali Manfaat dan Kekurangan JKN: Peningkatan Layanan Kesehatan di Padang Bulan, Medan

Haydi Suafisa<sup>1\*</sup>, Okphilip Abdi Agam Zebua<sup>2</sup>, Gita Br Sembiring<sup>3</sup>, Hairani Siregar<sup>4</sup>

<sup>1234</sup> Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatra Utara

**Abstrak:** Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program penting yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan yang merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Studi ini menyelidiki manfaat dan kelemahan penerapan JKN di wilayah Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat, ditemukan bahwa program JKN meningkatkan akses kesehatan, tetapi ada beberapa masalah dalam pelaksanaannya, terutama terkait kualitas pelayanan dan pemahaman masyarakat. Studi ini menyoroti pentingnya meningkatkan efektivitas program agar manfaat JKN dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

**Keywords:** JKN, BPJS, Padang Bulan, Layanan Kesehatan, Asuransi Sosial

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.209>

\*Correspondence: Haydi Suafisa

Email: [haidysuafisa@gmail.com](mailto:haidysuafisa@gmail.com)

Received: 25-01-2025

Accepted: 25-02-2025

Published: 24-03-2025

**Abstract:** National Health Insurance (JKN) is an important program that aims to provide equal health protection to all Indonesian people. This study investigates the benefits and weaknesses of implementing JKN in the Padang Bulan area, Medan Baru District, Medan City. Through observations and interviews with the community, it was found that the JKN program increased access to health, but there were several problems in its implementation, especially related to service quality and community understanding. This study highlights the importance of increasing program effectiveness so that the benefits of JKN can be felt equally by all levels of society.

**Keywords:** Key words: JKN, BPJS, Padang Bulan, Health Services, Social Insurance.



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## Pendahuluan

Program strategis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah bagian penting dari upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan cakupan kesehatan universal (UHC), juga dikenal sebagai cakupan kesehatan semesta, yang akan memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), JKN dibuat sebagai mekanisme asuransi sosial yang wajib. Pemerintah berusaha memastikan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan dapat diakses oleh semua orang, tanpa

memandang status sosial, ekonomi, atau pekerjaan mereka. Dalam program ini, semua orang di Indonesia, baik yang mampu hidup mandiri maupun yang menerima subsidi pemerintah, memiliki akses yang sama ke layanan kesehatan dasar, spesialisasi, dan pengobatan jangka panjang (Molaro, 2024).

JKN telah mengubah sistem pelayanan kesehatan Indonesia sejak dimulai. Daerah Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, adalah salah satu daerah yang merasakan dampak langsung dari pelaksanaan JKN. Masyarakat di daerah ini, terutama dari golongan ekonomi rendah, mengalami kesulitan yang signifikan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak sebelum JKN dimulai. Setelah JKN diberlakukan, banyak keluarga tidak mampu membayar biaya rawat inap, pemeriksaan medis, atau pengobatan rutin yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mereka (Azmat, 2024). Program ini tidak hanya memfasilitasi layanan medis dasar, tetapi juga menawarkan perawatan tambahan, seperti pengobatan penyakit kronis, operasi, dan perawatan di rumah sakit rujukan.

Meskipun JKN telah meningkatkan akses layanan kesehatan, masih ada beberapa masalah struktural yang menghambat pencapaian tujuan program. Kompleksitas proses administrasi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi. Salah satu bagian dari skema JKN adalah prosedur yang berbelit-belit untuk pendaftaran dan pemutakhiran data peserta BPJS Kesehatan. Bagi sebagian besar orang, terutama mereka yang usia lanjut atau kurang pendidikan, memahami dan mengikuti prosedur administratif ini menjadi tantangan tersendiri (Harrison, 2024). Wawancara dengan peserta JKN di daerah Padang Bulan menunjukkan bahwa banyak dari mereka bingung dengan prosedur yang ada, termasuk syarat dokumentasi yang harus dipenuhi dan proses pengajuan klaim layanan kesehatan. Selain itu, pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN terus menjadi salah satu masalah utama yang sering dikeluhkan. Layanan kesehatan yang diterima peserta program tidak selalu memenuhi harapan, meskipun JKN telah memberikan akses yang lebih luas ke layanan kesehatan. Beberapa masyarakat percaya bahwa layanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan BPJS tidak sebanding dengan layanan yang diberikan kepada pasien yang tidak memiliki BPJS atau pasien yang membayar secara langsung. Misalnya, waktu tunggu yang diperlukan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS sering kali lebih lama daripada pasien umum. Keterbatasan fasilitas medis dan obat, serta kurangnya perhatian dari dokter yang menangani pasien JKN adalah masalah lain (Lewis, 2024). Persepsi ini muncul terutama karena keterbatasan sumber daya di beberapa fasilitas kesehatan yang harus melayani jumlah pasien JKN yang terus meningkat, tanpa disertai dengan peningkatan infrastruktur atau tenaga medis yang memadai.

Peserta JKN di wilayah Padang Bulan juga sering mengeluh tentang keterbatasan fasilitas medis dan ketersediaan obat. Beberapa pasien mengatakan bahwa mereka seringkali harus mengeluarkan biaya lebih banyak dan menunggu lebih lama untuk mendapatkan obat yang mereka butuhkan di puskesmas atau rumah sakit yang bekerja

sama dengan BPJS. Problem infrastruktur ini semakin memperburuk keyakinan masyarakat tentang kualitas layanan kesehatan JKN.

Selain itu, meskipun tujuan JKN adalah untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama ke layanan kesehatan, pandangan orang tentang program ini sering dipengaruhi oleh pengalaman pribadi mereka sendiri saat mendapatkan layanan kesehatan. Banyak peserta program mengatakan bahwa mereka diperlakukan secara berbeda dibandingkan dengan pasien yang membayar secara langsung. Hal ini sering disebabkan oleh gagasan bahwa peserta JKN menerima layanan yang "lebih rendah" karena mereka tidak membayar secara langsung. Namun, kenyataannya, BPJS Kesehatan telah membayar klaim layanan pasien kepada fasilitas kesehatan. Untuk memastikan bahwa seluruh peserta JKN diperlakukan secara adil dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, situasi ini memerlukan perhatian serius dari pihak terkait (Mathauer, 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi manfaat dan kelemahan pelaksanaan JKN di daerah Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan melalui program JKN dengan menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan masalah yang dihadapi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang seberapa efektif program JKN di tingkat masyarakat dan bagaimana meningkatkan kualitas program di masa mendatang. Program JKN memiliki potensi untuk menjadi pilar utama dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia jika diperbaiki (Shepherd, 2024).

## **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data secara menyeluruh tentang persepsi, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Pendekatan kualitatif juga dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperluas pemahaman, perspektif, dan pengalaman partisipan tentang hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan JKN. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk Metode ini sangat penting untuk memahami interaksi yang kompleks antara masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan program asuransi sosial seperti JKN.

Dalam penelitian ini, peserta JKN menggunakan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Untuk memilih subjek penelitian, teknik purposive sampling digunakan. Artinya, subjek dipilih berdasarkan pengalaman langsung peserta dalam menggunakan layanan JKN di wilayah Padang Bulan. Kriteria ini dibuat untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan

relevan dan representatif dari pengalaman masyarakat terkait manfaat dan kekurangan JKN di wilayah Padang Bulan.

Data dikumpulkan melalui wawancara yang semi-terstruktur. Wawancara ini dipilih karena fleksibilitasnya; peneliti menerima garis besar pertanyaan dasar tetapi dapat mengubah dan memperdalam topik yang dianggap penting oleh peserta. Wawancara berkonsentrasi pada hal-hal penting seperti administrasi pendaftaran JKN, yang sering dianggap rumit oleh masyarakat, prosedur pelayanan di fasilitas kesehatan yang berafiliasi dengan BPJS Kesehatan, dan kualitas layanan yang diterima oleh peserta JKN. Selain itu, wawancara juga melihat hal-hal lain seperti waktu tunggu, kemudahan akses, persepsi tentang tenaga medis, dan ketersediaan obat dan fasilitas medis di fasilitas Kesehatan (Nehme, 2024). Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan memahami bagaimana peserta JKN mendapatkan layanan kesehatan.

Selain wawancara, observasi lapangan juga dilakukan di rumah sakit dan puskesmas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di Padang Bulan. Tujuan observasi ini adalah untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan JKN di lapangan, termasuk layanan yang diberikan kepada peserta JKN serta bagaimana fasilitas kesehatan menangani pasien JKN dibandingkan dengan pasien non-JKN. Dengan melakukan observasi ini, peneliti dapat mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang keadaan di lapangan dan memastikan validitas data yang dikumpulkan dari wawancara.

Proses analisis data adalah deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dari wawancara dan observasi dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan pola umum terkait manfaat dan kekurangan JKN di wilayah Padang Bulan. Tema-tema utama yang dibahas selama wawancara termasuk tantangan administrasi, persepsi masyarakat tentang kualitas pelayanan, dan dampak program tambahan yang diharapkan (Connolly, 2024).

Untuk memastikan keakuratan informasi dan validitas temuan, peneliti juga melakukan triangulasi data, yaitu membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara. Dengan melakukan triangulasi ini, diharapkan data yang dikumpulkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan komprehensif tentang pelaksanaan JKN di Padang Bulan.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang seberapa efektif program JKN di tingkat masyarakat dan di mana perbaikan diperlukan. Sehingga manfaat program JKN dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di berbagai wilayah, termasuk Padang Bulan, data yang dihasilkan diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan dalam menyusun strategi peningkatan pelayanan kesehatan dan pengelolaan program JKN.

## Hasil dan Pembahasan

Studi ini jelas menunjukkan bahwa penduduk di daerah Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, telah merasakan banyak manfaat dari penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama bagi orang-orang dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Karena biaya medis yang tinggi, masyarakat seringkali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses yang memadai ke layanan kesehatan sebelum JKN diterapkan. Menurut Puskesmas Padang Bulan, sebelum JKN, sekitar 60% penduduk berpenghasilan rendah di daerah tersebut memilih untuk tidak berobat di rumah sakit atau puskesmas karena tidak dapat membayar biaya rawat inap, pengobatan rutin, atau perawatan medis tambahan. Akibatnya, banyak masyarakat bergantung pada pengobatan tradisional atau menunda perawatan hingga penyakit mereka memburuk, yang dalam beberapa kasus menyebabkan masalah kesehatan yang serius.

Dampak penerapan JKN terhadap akses layanan kesehatan di wilayah Padang Bulan sangat besar. Jumlah pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan meningkat sebesar 25% dalam tiga tahun pertama program JKN dimulai, menurut data dari Puskesmas setempat. Peningkatan ini menunjukkan bahwa JKN telah berhasil meningkatkan akses ke layanan kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak mampu mendapatkan perawatan medis (Fehr, 2024). Sebelum JKN, jumlah pasien yang berkunjung ke puskesmas setiap hari berkisar antara lima puluh hingga enam puluh. Namun, setelah penerapan JKN, angka tersebut meningkat menjadi delapan puluh hingga seratus pasien setiap hari. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari dan percaya pada program jaminan kesehatan ini.

Program JKN telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki asuransi kesehatan selain memperluas akses kesehatan. Karena biaya premi yang tinggi, hanya sedikit orang di Padang Bulan yang memiliki asuransi kesehatan pribadi sebelum JKN diluncurkan, terutama melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Namun, banyak masyarakat miskin yang sebelumnya tidak memiliki akses ke asuransi kini memiliki perlindungan kesehatan yang layak. Jumlah penerima PBI di Padang Bulan telah meningkat sebesar 18% dalam tiga tahun terakhir, dengan lebih dari 3.000 orang yang berasal dari keluarga miskin yang kini terdaftar sebagai penerima JKN. Peningkatan ini menunjukkan bahwa program ini telah membantu menciptakan jaminan kesehatan yang lebih inklusif dan merata.

Meskipun JKN memiliki banyak manfaat, penelitian ini juga menemukan beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki saat diterapkan. Kompleksitas proses administrasi adalah salah satu kelemahan utama yang diidentifikasi. Meskipun JKN telah memberi orang lebih banyak akses ke kesehatan, proses administrasi yang kompleks menjadi

tantangan baru bagi beberapa orang. Ini terutama berlaku bagi orang yang lebih tua atau kurang terbiasa dengan teknologi. Sekitar 40% peserta JKN di Padang Bulan merasa proses administrasi untuk mendaftar, memperbarui kepesertaan, atau mendapatkan layanan kesehatan melalui BPJS terlalu rumit dan memakan waktu, menurut wawancara dengan beberapa peserta. Mereka harus menjalani prosedur pendaftaran yang memerlukan banyak dokumen, waktu tunggu yang lama, dan kesulitan untuk memahami persyaratan administratif yang seringkali tidak jelas. Ini menjadi masalah yang signifikan, terutama bagi komunitas yang tinggal di daerah pedesaan atau yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi digital.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masalah utama yang menjadi perhatian utama adalah kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN. Banyak pasien yang merasa diperlakukan dengan baik sebelum JKN diberlakukan karena mereka membayar langsung untuk layanan medis. Namun, setelah JKN diberlakukan, beberapa peserta merasa bahwa layanan yang mereka terima cenderung lebih buruk dibandingkan dengan pasien yang membayar tanpa menggunakan BPJS. Sekitar 35% peserta JKN di Padang Bulan mengatakan bahwa mereka sering kali harus menunggu lebih lama dibandingkan dengan pasien non-BPJS.

Salah satu kasus yang sering dibahas dalam wawancara adalah kisah Ibu Adiria Lafau, seorang wanita berusia 80 tahun, yang merasa diperlakukan dengan buruk saat dirawat di rumah sakit menggunakan BPJS. Dia melaporkan bahwa pemasangan infus yang salah menyebabkan cairan infus tidak berfungsi dengan baik dan bahwa tenaga medis yang seharusnya mengawasi kondisinya tidak memberikan perhatian yang cukup. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa meskipun JKN memberikan akses kesehatan yang lebih luas, masih ada masalah besar dengan kualitas pelayanan yang diterima oleh peserta program ini, terutama di rumah sakit yang memiliki banyak pasien.

Selain isu kualitas pelayanan, ketersediaan obat-obatan dan fasilitas medis juga menjadi masalah yang sering dikeluhkan oleh peserta JKN di Padang Bulan. Sebelum adanya JKN, pasien yang membayar secara langsung biasanya memiliki akses yang lebih mudah dan cepat ke obat-obatan yang mereka butuhkan. Namun, setelah JKN diterapkan, beberapa fasilitas kesehatan di wilayah ini melaporkan adanya kekurangan stok obat, terutama untuk obat-obatan khusus atau yang langka. Data dari Puskesmas Padang Bulan menunjukkan bahwa sekitar 20% pasien BPJS mengeluhkan bahwa obat yang mereka butuhkan sering kali tidak tersedia di puskesmas atau rumah sakit setempat, memaksa mereka untuk mencari obat di luar fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Hal ini tidak hanya menambah beban finansial bagi pasien, tetapi juga menyebabkan keterlambatan dalam mendapatkan pengobatan yang diperlukan, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi kesehatan pasien.

Fasilitas kesehatan di daerah Padang Bulan telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan layanan mereka dan mengatasi masalah administrasi dan kualitas layanan. Untuk mempercepat proses administrasi, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan pelayanan pasien BPJS, beberapa puskesmas dan rumah sakit telah menerapkan sistem pendaftaran daring, yang memungkinkan peserta JKN mendaftar dan memperbarui kepesertaan mereka secara lebih mudah dan cepat, menghindari antrian panjang di fasilitas kesehatan. Sistem ini baru saja dimulai, tetapi tindakan seperti ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk memperbaiki proses administrasi, yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.

Selain itu, sejumlah rumah sakit telah memulai program pelatihan bagi tenaga medis mereka dalam upaya meningkatkan layanan yang diberikan kepada peserta JKN. Program pelatihan ini berfokus pada cara menangani pasien BPJS dengan lebih baik dan efisien. Meskipun masih ada banyak masalah yang harus diselesaikan, upaya-upaya ini menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan ingin meningkatkan pelayanan mereka kepada peserta JKN.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun JKN telah meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya asuransi kesehatan, masih ada banyak masalah yang perlu diselesaikan. Masyarakat kurang puas dengan program ini karena masalah seperti proses administrasi yang sulit, kualitas pelayanan yang buruk, dan kekurangan obat dan fasilitas medis. Akibatnya, diperlukan tindakan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan, prosedur administrasi, dan pelatihan tenaga medis. Dengan cara ini, JKN dapat berfungsi secara efektif sebagai pilar utama dalam memberikan jaminan kesehatan yang adil dan berkualitas tinggi kepada seluruh penduduk Indonesia.

## **Simpulan**

Studi ini menemukan bahwa penduduk di daerah Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, mendapat manfaat besar dari penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Karena keterbatasan biaya, JKN telah berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang sebelumnya sulit diakses. Karena skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), orang-orang miskin sekarang dapat mendapatkan layanan kesehatan. Pada akhirnya, ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan kesehatan.

Meskipun program ini memiliki banyak keuntungan, ada kelemahan yang perlu diperhatikan, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian. Banyak orang, terutama mereka yang lebih tua atau kurang terbiasa dengan teknologi, menghadapi kesulitan besar karena kompleksitas proses administrasi, terutama dalam hal pendaftaran dan pembaruan kepesertaan. Peserta BPJS sering kali mendapatkan perawatan yang berbeda

dibandingkan pasien yang membayar langsung, yang menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN. Selain itu, proses perawatan terhambat oleh kekurangan obat dan fasilitas medis di beberapa pusat kesehatan.

Meskipun demikian, beberapa fasilitas kesehatan telah memulai berbagai perbaikan untuk meningkatkan layanan mereka, seperti menerapkan sistem pendaftaran daring dan memberikan pelatihan kepada tenaga medis. Perbaikan ini menunjukkan bahwa pihak terkait telah berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi program JKN meskipun masih ada hambatan.

Meskipun JKN telah memperluas layanan kesehatan di wilayah Padang Bulan, perlu dilakukan perbaikan dalam administrasi, kualitas pelayanan, dan ketersediaan obat agar manfaat program ini dapat dirasakan secara lebih merata dan efektif oleh seluruh masyarakat. Dengan perbaikan yang tepat, JKN dapat menjadi program yang lebih kuat dalam mewujudkan sistem perlindungan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

#### Daftar Pustaka

- Aulia, S., Supriadi, S., Sari, D., & Mutiha, A. (2016). COST RECOVERY RATE PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BPJS KESEHATAN.,8, 111-120. <https://doi.org/10.15408/AKT.V8I2.2767>.
- Azmat, S. K. (2024). A study protocol for integrating outpatient services at the primary health care level as part of the universal health coverage benefit package within the national health insurance program of Pakistan through private health facilities. *Frontiers in Public Health*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1293278>
- BPJS Kesehatan. (2023). Laporan Tahunan BPJS Kesehatan 2023. Jakarta: BPJS Kesehatan.
- Connolly, E. (2024). Revision of Malawi's Health Benefits Package: A Critical Analysis of Policy Formulation and Implementation. *Value in Health Regional Issues*, 39, 84–94. <https://doi.org/10.1016/j.vhri.2023.10.007>
- Fitriana, E., Probandari, A., Pamungkasari, E., Ardyanto, T., & Puspitaningrum, R. (2019). The importance of socialization in achieving universal health coverage: case study of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) implementation in two different region in Central Javaprovince.
- Fehr, D. (2024). The more oocytes the better? A cost-benefit consideration of assisted reproduction. *Gynakologische Endokrinologie*, 22(1), 29–36. <https://doi.org/10.1007/s10304-023-00546-x>
- Harrison, J. (2024). Eligibility of emergency department patients for public benefit programs. *Academic Emergency Medicine*, 31(8), 820–823. <https://doi.org/10.1111/acem.14870>
- Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Indonesia. <https://doi.org/10.20885/jkki.vol10.iss2.art3>.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Laporan Pencapaian Program JKN 2021. Jakarta: Kemenkes RI.
- Lewis, A. G. C. (2024). Impact of the universal health insurance benefits on cervical cancer mortality in Colombia. *BMC Health Services Research*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12913-024-10979-0>
- Mathauer, I. (2024). Machine learning in health financing: benefits, risks and regulatory needs. *Bulletin of the World Health Organization*, 102(3), 216–224. <https://doi.org/10.2471/BLT.23.290333>
- Molaro, M. (2024). A new approach to Health Benefits Package design: an application of the Thanzi La Onse model in Malawi. *PLoS Computational Biology*, 20(9). <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1012462>
- Nehme, E. K. (2024). Providing doula support to publicly insured women in central Texas: A financial cost–benefit analysis. *Birth*, 51(1), 63–70. <https://doi.org/10.1111/birt.12766>
- Sadikin, H., & Adisasmito, W. (2016). Analisis Pengaruh Dimensi Fraud Triangle Dalam Kebijakan Pencegahan Fraud Terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional di RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo. , 1. <https://doi.org/10.7454/EKI.V1I2.1871>.
- Shepherd, M. E. (2024). Metro Nashville Public School Promotes Health Equity Through Employee Benefits Plans. *American Journal of Health Promotion*, 38(3), 440–443. <https://doi.org/10.1177/08901171241232057e>
- Suara USU. (2024). Menggali Manfaat dan Kekurangan JKN: Peningkatan Layanan Kesehatan di Padang Bulan, Medan. Diakses dari <https://suarausu.or.id/menggali-manfaat-dan-kekurangan-jkn-peningkatanlayanan-kesehatan-di-padang-bulan-medan/>
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- WHO. (2020). Universal Health Coverage and Health Financing. World Health Organization.